

DIMENSI KEMISKINAN DAN UPAYA MENGATASI MASALAHNYA

Oleh:

Sriadi Setyawati

Jurusan Pendidikan Geografi, FIS UNY

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, maka dalam pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya difokuskan pada peningkatan ekonomi saja tetapi harus terpadu. Sehingga persoalan potensi kualitas sumber daya manusia dan penduduk, serta wilayah, kebutuhan, kendala atau hambatan dan indikator secara operasional menjadi penting untuk diketahui. Oleh karena itu sebelum menentukan suatu kebijakan atau program – program, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi potensi kualitas sumber daya manusia dan penduduk serta wilayah, kebutuhan, kendala atau hambatan yang ada. Karena dengan inventarisasi dan identifikasi potensi kualitas sumberdaya, dapat diketahui variasi karakteristik wilayah yang berbeda pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Partisipasi masyarakat merupakan “ujung tombak” untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan, maka mengikut sertakan masyarakat dalam implementasi program pengentasan kemiskinan merupakan suatu keharusan. Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan disebabkan lemahnya inventarisasi dan identifikasi potensi kualitas sumber daya manusia, penduduk dan wilayah. Serta lemahnya inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dan kendala atau hambatan yang ada.

Kata kunci : *sumber daya, inventarisasi, identifikasi.*

Pendahuluan.

Fenomena kemiskinan biasanya selalu digambarkan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, standar hidup yang rendah, kekurangan secara materi, selalu dalam kondisi berhutang, tidak sejahtera dan tidak mampu hidup layak.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang (developing countries) dengan penghasilan penduduknya rendah. Penghasilan atau tingkat pendapatan rendah akan berdampak pada tingkat kehidupan dan produktivitas yang rendah. Tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi, dengan komposisi penduduk menurut umur adalah muda. Tingkat ketergantungan atau beban ketergantungan adalah tinggi, sehingga tingkat pengangguran dan setengah

pengangguran cenderung meningkat. Jika ini tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan bahan pangan, ketidak seimbangan antara pertambahan penduduk dengan lapangan pekerjaan dan bahan pangan ini berakibat pada tersingkirnya orang-orang ke wilayah kemiskinan bahkan di bawah garis kemiskinan, yaitu termasuk penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti sandang, pangan dan papan. Maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang belum dapat diatasi sampai saat ini. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan. Seperti beras untuk orang miskin (RASKIN), gerakan orang tua asuh (GNOTA), bantuan operasional sekolah (BOS), program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), bantuan langsung tunai (BLT) dan padat karya. Bagaimana dampak dari program-program tersebut, kenyataan dilapangan fenomena seperti pengangguran, anak putus sekolah dan gelandangan masih banyak. Dapat disimpulkan bahwa program-program pemerintah guna mengatasi kemiskinan belum optimal. Mengapa ini terjadi? karena program – program pengentasan kemiskinan yang selama ini ada datangnya dari atas atau pemerintah pusat, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan terjadi disebabkan oleh kondisi alamnya atau disebut dengan kemiskinan alamiah dan kemiskinan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, atau disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan juga dapat terjadi karena budaya, yaitu melihat faktor nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat disebut dengan kemiskinan kultural. Oleh karenanya membahas masalah kemiskinan tidak dapat terlepas dari faktor-faktor alam, struktural dan kultural. Sehingga lebih mudah untuk menganalisis kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya, guna merancang strategi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama nasional, sehingga harus segera diusahakan berbagai cara untuk mengatasi dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karenanya perlu diketahui adanya keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator yang jelas. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar menanggulangi kemiskinan yang sifatnya permanen dan berkelanjutan. Maka dalam makalah ini akan dibahas tiga dimensi kemiskinan yaitu dimensi alamiah, struktural dan kultural. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka judul makalah ini adalah " Dimensi Kemiskinan dan Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan."

Dimensi Kemiskinan.

Berdasarkan penyebabnya ada tiga dimensi kemiskinan yaitu: Pertama dimensi alamiah, kedua dimensi struktural dan ketiga dimensi kultural adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Alamiah

Kemiskinan alamiah dapat terjadi karena sumber daya alam yang terbatas, bencana alam dan penggunaan teknologi yang rendah. Misal:

- a. Bencana alam semburan lumpur lapindo di Sidoarjo, menyebabkan munculnya kemiskinan baru. Karena ribuan penduduk kehilangan asset, pekerjaan, anak-anak tidak dapat sekolah yang semakin menambah keterpurukan penduduk. Hal ini akan semakin menambah jumlah penduduk miskin. Demikian alam sangat berpengaruh pada kemiskinan, karena suatu bencana lumpur sarana prasarana rusak. Penduduk kehilangan segala-galanya, seperti materi, pekerjaan tetapnya yang merupakan modal untuk dapat hidup sejahtera. Tetapi semuanya itu telah sirna, sehingga menjadikan penduduk yang tertimpa bencana alam sengsara tidak berdaya dan miskin. Lumpur lapindo wilayahnya justru semakin meluas berdampak pada daerah sekitar, udara menjadi tercemar karena bau belerang, air tanah juga tercemar sedangkan air merupakan syarat utama untuk ada tidaknya suatu kehidupan dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat.
- b. Daerah pertanian lahan kering di Kabupaten Gunung Kidul, di wilayah ini petani mengusahakan lahannya dengan usaha tani yang sangat sederhana atau tradisional, yaitu merupakan usaha tani subsisten dengan produktivitas yang rendah. Hasilnya hanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga petani, dengan resiko ketidakpastian dan beban hidup yang berat. Hal seperti ini banyak dijumpai pada petani lahan kering. Dimana keluaran identik dengan konsumsi, lahan ditanami dengan satu atau dua jenis tanaman pokok yaitu padi atau jagung dan ketela. Output rendah karena peralatan atau teknologi yang digunakan rendah dan sangat sederhana. Modal kecil, karena lahan dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang berlaku disini. Hutang merupakan kesulitan bagi eksistensi para petani menyebabkan mereka hanya dapat bertahan hidup dan relatif statis. Karena alamnya kering, tandus, membuat tanah tidak subur. Sehingga penduduk yang bekerja sebagai petani, sangat bergantung dengan irama alam. Mereka hanya dapat menggarap lahan pertaniannya satu tahun sekali, yaitu pada musim penghujan. Rumah tangga petani pada umumnya tidak dapat hidup sejahtera atau miskin. Kemiskinan tersebut terjadi karena alam tidak bersahabat dengan mereka sehingga mereka jatuh miskin. Kemiskinan tersebut merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga disebut dengan kemiskinan alamiah. Karena faktor alam sangat signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan.

- c. Hama dan penyakit, obat untuk memberantas hama dan penyakit harganya mahal, maka petani tidak dapat membeli sehingga pertaniannya diserang hama dan penyakit. Tetapi jika penggunaannya berlebihan atau over dosis akan berdampak negatif, yaitu munculnya kerawanan ekologis. Ishak dan Shodiq (1997 : 23) mengatakan bahwa: kerawanan ekologis adalah kerapuhan ekosistem tropis dimana sistem biologi yang kompleks itu menjadi sangat rentan, sangat bergantung pada produk teknologi kimiawi untuk mengatasi masalah hama dan penyakit. Penggunaan obat pemberantas hama dan penyakit yang over dosis akan mengakibatkan hama tersebut lebih resisten atau lebih tahan dan masalah pencemaran lingkungan. Penduduk pedesaan yang sebagian besar petani menekan keras sumber daya lahan sedangkan sumber daya lahan jumlahnya terbatas. Ini adalah suatu fenomena yang benar – benar membahayakan ekosistem di bidang pertanian. Karena diserang hama dan penyakit, maka produksi pertanian menurun, petani akan rugi, pendapatan dari sektor pertanian rendah, tidak sejahtera, miskin dan tidak dapat hidup layak. Maka di pedesaan terjadi tekanan agraris, yaitu ketimpangan antara produksi, luas lahan dan jumlah penduduk. Akhirnya jumlah petani yang miskin tidak berkurang, tetapi menjadi bertambah jumlahnya.

2. Dimensi Struktural

Menurut Sri Purwatiningsih (2007 : 246), kemiskinan struktural adalah kemiskinan terjadi akibat adanya ketimpangan sosial dengan kebijakan pemerintah yang justru tidak bersahabat dengan penduduk miskin. Menurut pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena suatu organisasi atau pemerintahan memutuskan suatu kebijakan sehingga mengakibatkan penduduk mengalami kemiskinan adalah sebagai berikut: Misal :

- a. Sistem pertanian, Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian merupakan dasar ekonomi, mulai dahulu saat ini bahkan saat nanti. Pertanian masih akan tetap merupakan sumber bahan makanan penduduk. Beras merupakan makanan pokok bagi penduduk, ironisnya petani sebagai produsen selalu bergelut dengan kemiskinan. Jika berbicara tentang petani selalu identik dengan kemiskinan. Mengapa ini terjadi, adakah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani, sehingga mereka secara struktural menjadi miskin. Karena harga pupuk dan obat pemberantas hama penyakit mahal tidak dapat dibeli oleh petani, bahkan bahan – bahan tersebut menjadi langka. Sehingga petani rugi karena gagal panen. Harga gabah berfluktuasi, petani merasa diombang-ambingkan. Pada musim–musim tertentu harga gabah murah,

tidak dapat bersaing dengan beras import yang harganya relatif lebih murah, tidak dapat menentukan harga sehingga hasilnya dijual murah. Padahal pupuk dan obat pemberantas hama penyakit semakin mahal. Petani mengalami kerugian karena input dan output tidak seimbang, petani menjadi statis, hasilnya hanya sekedar untuk dapat bertahan hidup, tidak sejahtera dan miskin.

- b. Kredit Untuk Rakyat (KUR), kredit untuk rakyat yang digulirkan melalui salah satu bank dimaksudkan agar dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah kebawah yang bergerak di sektor informal atau pedagang kecil. Sehingga mereka mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Namun kebijakan ini juga tidak dapat diakses oleh para pedagang kecil karena syarat – syaratnya tidak mampu dipenuhi oleh mereka. Maka pupuslah harapan tidak dapat mengembangkan usahanya, disebabkan kekurangan modal. Bagi yang dapat menjangkau sebenarnya berat, harus membayar bunga, karena mengembangkan sektor informal tidak mudah. Mereka tidak menguasai pasar, harus bersaing dengan pedagang besar bermodal, maka sektor informal sulit untuk berkembang, tetap stagnan bahkan mati.
- c. Model pembangunan ekonomi yang dianut oleh suatu negara, yaitu model pembangunan yang memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan kemiskinan pada sekelompok penduduk. Model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan kepincangan perkembangan antara sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional dimana sebagian besar penduduk suatu negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi modern memperoleh berbagai fasilitas ekonomi dan dukungan politik dari pemerintah, agar mereka mampu membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kebijaksanaan memberikan berbagai fasilitas pada sektor ekonomi modern berarti, bahwa sektor ekonomi tradisional menjadi terhambat proses perkembangannya, yang mengakibatkan pendukung sektor ekonomi tradisional harus hidup dalam kemiskinan. Para pendukung sektor ekonomi tradisional miskin, karena adanya suatu kebijaksanaan ekonomi yang menganak tirikan mereka. Dalam situasi seperti ini maka pembangunan dan hasilnya, akan dinikmati oleh sekelompok kecil penduduk. Sedang mayoritas penduduk akan hidup tanpa menikmati hasil pembangunan, atau dengan kata lain harus hidup di luar pertumbuhan ekonomi yaitu miskin (Lukman Sutrisno, 1997: 17).

3. Dimensi Kultural,

Kemiskinan kultural disebabkan oleh nilai – nilai dan budaya yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang, seperti apatisme, boros, inferior, tidak mandiri dan tidak terintegrasinya unit masyarakat secara efektif dengan lembaga yang ada, adalah sebagai berikut: Misal:

- a. Kurangnya akses kekuasaan, tidak adanya akses keluarga miskin untuk menyampaikan keinginannya menyebabkan mereka selalu ketinggalan untuk dapat meraih hidup layak. Penduduk miskin merupakan orang-orang yang diharapkan untuk berpartisipasi, justru tersisihkan dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka tidak memiliki kontrol atau kesempatan memasuki sistem kekuasaan yang ada. Bahkan sebaliknya, sistem cenderung mematikan inisiatif penduduk miskin.
- b. Budaya patriarki merupakan budaya yang merendahkan perempuan (perempuan lebih rendah dari pada laki-laki), seperti budaya pada orang Jawa perempuan sebagai istri harus setia dan mengabdikan kepada laki-laki karena istri adalah sebagai "konco wingking." Pandangan ini menganggap dari generasi kegenerasi perempuan akan menjadi ibu, merawat dan mendidik anak – anak, tugas utamanya adalah di rumah. Kultur orang Jawa yang mempunyai cita – cita untuk anak laki – laki dapat "mikul dhuwur mendhem jero." Artinya bahwa anak laki – laki nantinya dapat mengangkat panji – panji keluarga setinggi – tingginya dan mengubur aib keluarga sedalam – dalamnya.
- c. Situasi subordinatif, bahwa perempuan itu berbeda dengan laki – laki, terutama yang membedakan adalah segi anatomi yang menyangkut perempuan dan laki-laki. Yaitu jenis kelamin, hanya karena berjenis kelamin perempuan maka mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda. Cenderung merugikan perempuan, karena perempuan itu dianggap lemah, nrimo, mengalah, sedangkan laki - laki dianggap kuat dan perkasa. Sehingga muncul anggapan bahwa laki – laki itu mempunyai kemampuan fisik yang lebih kuat dan kemampuan intelektual yang lebih dibanding dengan perempuan. Ada pembatas budaya bahwa perempuan dengan segala perilakunya jangan menyimpang dengan kodratnya, yang mengakibatkan perempuan tidak sebebas laki – laki.
- d. Etos kerja, bahwa kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya etos kerja, yang berhubungan dengan malas tidaknya seseorang untuk bekerja dan tidak boros atau hemat. Jadi seseorang akan hidup berkecukupan dan sejahtera apabila mereka rajin bekerja dan hemat..Tetapi seseorang akan miskin (selalu dalam kondisi kekurangan) dan tidak sejahtera apabila mereka malas dan boros. Oleh karenanya lembaga harus dapat menjaga interaksi sosial masyarakat, dalam hal ini

yang terjadi justru sebaliknya. Pada masyarakat justru banyak terjadi ketimpangan–ketimpangan. Seperti ketimpangan antara golongan kaya dengan golongan miskin semakin lebar, golongan kaya bertambah kaya golongan miskin tetap saja miskin. Karena golongan kaya mengeksploitasi golongan miskin. Jadi fenomena kemiskinan merupakan tantangan yang sangat serius saat ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa fenomena kemiskinan sangat beragam, bagaimana proses kemiskinan itu terjadi?. Jika pengetahuan kita dewasa ini mengenai keanekaragaman wajah kemiskinan di Indonesia masih sangat terbatas berapapun sumber daya yang digunakan akan sia – sia. Pengetahuan kita tentang keadaan golongan miskin, proses kemiskinan serta dinamika masih kurang memadai. Jadi berapapun sumber daya yang ditujukan kepada penduduk miskin, tampaknya golongan ini masih tetap terpenjarakan oleh struktur–struktur sosial yang eksploitatif melanggengkan ketergantungan penduduk miskin pada pemerintah. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengenalan teknologi baru dan fasilitas kredit murah, untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau penduduk kaya yang mempunyai pemilikan modal dan asset yang besar. Ironis sekali kita bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian, tetapi sebagian besar para petani adalah miskin. Hal ini terjadi karena sebagian besar petani rata-rata pemilikan luas lahannya adalah sempit, modal kecil, tidak memiliki asset. Sehingga pendapatan dari sektor pertanian rendah, mereka tidak dapat hidup sejahtera dan miskin. Maka hendaknya yang menjadi perhatian pertama–tama adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka. agar mereka dapat hidup layak (sejahtera), berada di atas garis kemiskinan atau tidak miskin lagi. Oleh karenanya masalah kemiskinan merupakan masalah yang mendasar dan penting dalam strategi pembangunan.

Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan.

Upaya pemerintah untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan telah diusakan dengan berbagai program, namun fenomena kemiskinan masih terdapat dimana–mana. Seperti pengangguran, anak putus sekolah, anak jalanan, pengemis, pengamen dan masih banyak lagi fenomena yang merujuk kepada fenomena kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa program–program yang diadakan oleh pemerintah tidak dapat berhasil dengan optimal. Mengapa demikian, banyak yang mengatakan dengan berbagai dalih. Program–program tersebut datangnya dari atas, metode kurang tepat, belum terpadu, tidak

terintegrasi, salah sasaran, terjadi penyimpangan, kebijakan yang salah, tidak melibatkan masyarakat dan masih banyak lagi alasan yang nadanya menyudutkan pemerintah.

Mengentaskan kemiskinan memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah, butuh waktu, strategi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk penduduk miskin. Oleh karenanya harus dilakukan dengan hati – hati, bahkan sangat hati-hati agar penduduk miskin dapat dientaskan dari penderitaan kemiskinan. Sebenarnya yang selalu menjadi pokok permasalahan ada pada manusia atau penduduk itu sendiri, karena peristiwa besar apapun yang terjadi baik itu di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dan masalah apapun yang harus dipecahkan di wilayah kita ini pada akhirnya selalu berhubungan dengan manusia. Kita bangsa Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam, sudah banyak usaha yang dilakukan guna mengatasi masalah kemiskinan. Namun berbagai pendapat tersebut bukannya saling mengisi atau melengkapi tetapi saling bertentangan, sehingga akar permasalahan kemiskinan tidak pernah diketemukan dan fenomena kemiskinan selalu muncul dalam perspektif baru yang tidak pernah terduga sebelumnya.

Jadi permasalahan kemiskinan yang ada terletak pada manusia dan penduduk serta wilayah, sebagai tempat tinggal penduduk. Untuk merencanakan perlu ditanyakan atau diketahui potensi manusia dan penduduk, potensi wilayah, kebutuhan dan kendala atau hambatan-hambatan yang ada. Potensi manusia dan penduduk, penduduk Indonesia memang sudah besar permasalahan bagaimana memanfaatkan jumlah penduduk yang besar tersebut menjadi sumberdaya yang terhindar dari kemiskinan, penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan bukan beban pembangunan, maka kualitas manusia dan penduduk perlu untuk diketahui. Berbicara tentang kualitas manusia dan penduduk, maka permasalahan variabel yang dijabarkan kedalam indikator-indikator menjadi penting untuk diketahui. Misalnya: kualitas manusia antara lain tenaga, daya tahan, kecerdasan, emosional, budi, iman. Kualitas penduduk antara lain jumlah, persebaran, kepadatan, komposisi, berbagai ukuran fertilitas dan mortalitas, migrasi, pertambahan, harapan hidup, pendapatan, kesejahteraan, kelembagaan, pendidikan, mata pencaharian, daya saing, teknologi, produktivitas, disiplin, kemandirian, solidaritas, etika lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik dan mungkin masih banyak indikator tambahan yang perlu diketahui dari suatu wilayah sebagai tempat tinggal penduduk. Potensi wilayah juga penting untuk diketahui. Misalnya: kualitas tanah, batuan, hasil tambang, air, udara, cuaca, iklim, land use, topografi, pertanian, industri, perdagangan, produktivitas lahan, sarana prasarana dan mungkin masih banyak indikator tambahan yang perlu diketahui dari suatu potensi fisik wilayah sebagai tempat tinggal penduduk.

Indikator sebagai suatu ukuran yang ringkas tentang tingkat, keadaan dan kecenderungan. Indikator sangat berguna bagi para perencana, penentu kebijakan, pembuat keputusan tentang arah perkembangan masalah ketimpangan sosial, serta untuk memantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Indikator dapat memberi aba – aba atau peringatan akan sesuatu, yang mungkin akan terjadi atau memberi petunjuk bahwa sesuatu telah terjadi (Surbakti dalam Syahbudin Latief, 2004 : 289).

Mengapa indikator tersebut penting untuk diketahui karena dengan adanya indikator dapat diketahui kualitas potensi sumber daya adalah sebagai berikut:

1. Profil manusia dan penduduk
2. Profil kondisi fisik wilayah sebagai tempat tinggal penduduk
3. Profil kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik
4. profil sarana prasarana
5. Kebutuhan yang diinginkan
6. Kendala atau hambatan – hambatan
7. Dapat merumuskan manusia dan penduduk yang dicita - citakan
8. Berbagai upaya untuk menyusun strategi program

Indikator yang ada perlu diidentifikasi sehingga dapat diketahui dengan jelas ada perbedaan potensi dan optimalisasi penggunaannya, ada persebaran sumber daya yang tidak merata, ada daerah yang cepat berkembang, ada daerah yang lambat berkembang, ada perbedaan wilayah dalam berbagai tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan). Perbedaan wilayah tersebut ditunjukkan dengan adanya variasi karakteristik dari potensi sumber daya manusia dan penduduk, potensi fisik sumber daya wilayah, kebutuhan dan kendala atau hambatan–hambatan yang ada.

Oleh karena itu kita harus hati–hati dengan paket program pengentasan kemiskinan yang sama untuk berbagai daerah, tanpa memperhatikan potensi, kebutuhan dan kendala atau hambatan–hambatan yang ada. Karena akan berdampak pada program pengentasan kemiskinan untuk mencapai tujuan serta sasaran seperti yang diharapkan, dan mungkin terjadi banyak penyimpangan, karena terkesan program tersebut dipaksakan. Strategi pembangunan yang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan penduduk dan pertumbuhan pendapatan nasional. untuk mengejar ketinggalan negara berkembang atas kemajuan negara maju. Tetapi kenyataannya strategi ini mengakibatkan adanya ketimpangan pembagian pendapatan, pengangguran, urbanisasi, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Sehingga masalah pembangunan di negara berkembang semakin kompleks.

Pembangunan merupakan cita – cita suatu negara dan bangsa untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan kemakmuran, perlakuan hukum yang

sama, kesejahteraan material mental dan spiritual, kebahagiaan yang merata, ketentraman, keamanan, untuk kebahagiaan lahir dan batin. Cita – cita yang mulia ini akan tercapai jika partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembangunan. Korten dalam Tyahya Supriatna (2000: 209) mengatakan bahwa : Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan. Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Demikian pula pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mempunyai arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses. Masyarakat perlu diberi kuasa dan wewenang serta berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan.

Partisipasi adalah “ujung tombak” dari konsep tata pemerintah yang baik karena merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan. Sebaiknya apapun sebuah program dirancang, namun jika dalam implementasinya mengabaikan partisipasi masyarakat sasaran, maka dapat diduga pelaksanaan dan hasil program tidak akan optimal (Bambang Wicaksono, 2007: 134). Jadi masyarakat sasaran dilibatkan dalam proses dari awal sampai akhir kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga masyarakat mempunyai pengalaman bagaimana mereka harus berbuat adil, jujur, dapat menilai, mengukur, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, sekaligus mereka memiliki pengalaman pembelajaran dalam pengentasan kemiskinan sesuai potensi yang dimiliki. Jadi mereka menemukan sendiri, mengapa menjadi miskin, bagaimana mengatasi, mengelola secara bersama – sama, pada akhirnya dapat mandiri dan berkelanjutan.

Mengapa terjadi kegagalan program pengentasan kemiskinan atau program tidak optimal. Karena adanya kekeliruan menyusun strategi program pengentasan kemiskinan, yang disebabkan lemahnya kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan kendala atau hambatan, serta lemahnya kemampuan mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan penduduk serta potensi sumber daya wilayah. Maka Identifikasi potensi sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemiskinan menjadi sangat penting dilakukan sebelum menyusun program pengentasan kemiskinan, agar tujuan dan sasaran pembangunan kemiskinan dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka dapat diambil beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan penyebabnya ada tiga dimensi kemiskinan, yaitu dimensi alamiah, dimensi struktural dan dimensi cultural.
- Fenomena kemiskinan masih tetap ada dimana – mana, karena upaya pengentasan kemiskinan belum optimal, disebabkan lemahnya inventarisasi dan identifikasi potensi kualitas sumber daya manusia dan penduduk, serta wilayah, kebutuhan, kendala atau hambatan.
- Inventarisasi dan identifikasi potensi kualitas sumber daya manusia dan penduduk, serta wilayah, kebutuhan, kendala atau hambatan sangat penting, sebagai dasar perencanaan program pengentasan kemiskinan.
- Partisipasi masyarakat dalam implementasi program pengentasan kemiskinan sangat penting, untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Sehingga tepat sasaran dan tujuan.

Saran

- Guna mendukung program pengentasan kemiskinan, maka diadakan inventarisasi dan identifikasi potensi kualitas sumber daya dengan strategi yang tepat dan menyeluruh.
- Menentukan indikator potensi sumber daya yang jelas dan terukur.
- Setelah data terkumpul dengan indikator yang jelas dilakukan perencanaan program – program, berdasarkan potensi kualitas sumber daya, kebutuhan dan kendala atau hambatan yang ada.
- Melibatkan masyarakat dalam implementasi program pengentasan kemiskinan dari awal sampai akhir, dengan tujuan, sasaran yang tepat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bambang Wicaksono, 2007, Pendekatan Good Governance Dalam Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan, Yogyakarta : PSK UGM.
- Ishak & Shodiq, 1997, Tindakan Petani Dan Perubahan Ekosistem Sawah, Prisma No. 7 Tahun XXVI Juli – Agustus, Jakarta : LP3ES.
- Loekman Soetrisno, 1997, Kemiskinan Perempuan Dan Pemberdayaan, Yogyakarta: Kanisius.
- Sri Purwatiningsih, 2007, Kemiskinan Dan Posisi Perempuan Dalam Sumber Daya Manusia Tantangan Masa Depan, Yogyakarta : PSK UGM.

|| Dimensi Kemiskinan dan Upaya Mengatasi Masalahnya

Syahbudin Latief dkk, 2004, *Dinamika Kependudukan Dan Kebijakan*, Yogyakarta: PSKK UGM.

Tyahya Supriatna, 2000, *Strategi Pembangunan Kemiskinan*, Jakarta : Rineka Cipta.